

Siaran Pers

Nomor: IP.201/01/05/BKT/2024

Keselamatan dan Keamanan Bus Pariwisata Jadi Sorotan, Baketrans Kemenhub Gelar Diskusi Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Solo – Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan melalui Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Untuk Menekan Angka Kecelakaan Bus Pariwisata” di Solo pada Selasa (28/5).

Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Jumardi menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mengolah masukan dari semua stakeholder menjadi suatu rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementerian Perhubungan dalam rangka memperkuat regulasi dan kelembagaan pada transportasi jalan untuk menekan angka kecelakaan. “Khususnya peningkatan keselamatan angkutan bus pariwisata yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional dan perlu mendapat penanganan serius serta komprehensif” ujarnya.

Analisis Kebijakan Ahli Utama, Umar Aris dalam sambutannya menjelaskan pemerintah perlu mengintervensi melalui penerapan regulasi yang berkontribusi positif untuk peningkatan keselamatan dan keamanan angkutan bus pariwisata serta butuh sistem kelembagaan yang fokus terhadap permasalahan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Untuk menghasilkan kebijakan yang legitimate terkait keselamatan dan keamanan angkutan jalan dibutuhkan masukan konstruktif yang pertama dari unsur regulator dimana kita perlu duduk bersama dengan regulator-regulator lainnya, yang kedua dari unsur operator, dan terakhir dari unsur user atau pengguna seperti masyarakat, akademisi, dll.” jelas Umar.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Soerjanto Tjahjono mengatakan bahwa insiden bus pariwisata selama ini sebagian besar pada masalah rem dan yang kedua adalah faktor manusia seperti kelelahan.

"Kedua hal ini sudah lebih dari 80% penyebab dari insiden pada bus pariwisata, jadi manusia dan masalah rem. Namun hal yang mendasar dalam penguatan regulasi salah satunya adalah hari libur pengemudi bus yang akan berpengaruh pada masalah kelelahan" tambahnya.

Selain itu KNKT telah mengeluarkan 2 rekomendasi kepada Kemenparekraf agar tempat wisata wajib menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi," tutup Soerjanto.

Pengawasan dan pengendalian menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan angkutan jalan khususnya bus pariwisata sehingga komunikasi, kolaborasi dan koordinasi yang melibatkan semua stakeholder terkait harus saling melengkapi dengan tujuan untuk mewujudkan angkutan jalan yang berkeselamatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kabag Hukum dan Humas Setditjen Hubdat, Aznal, Direktur Operasional PT. WH Transportasi Indonesia, Romy Firmangustri, Direktur Training IRSP, Eko Reksodipuro, DPD ASITA D.I Yogyakarta, Fachri Herkusuma, Plh. Kadishub Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Organda dan Otobus Indonesia. (RH/TZ)

**

29 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM, KERJASAMA DAN HUMAS

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Email: baketrans@kemenhub.go.id

Facebook: baketrans

Twitter: Baketrans

Instagram: Baketrans